

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Globalisasi yang didukung dengan kecanggihan teknologi dan informasi menyebabkan terbentuknya masyarakat lintas batas dalam hubungan saling terikat yang dinilai kompleks. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh berbagai macam aktor internasional untuk meningkatkan pengaruh mereka melalui peluang-peluang yang kemudian dibenturkan dengan kebijakan pemerintah suatu negara. Sehingga peluang-peluang ini jika tidak ditangani secara dini dengan baik maka bisa menjadi sumber konflik yang mengancam pertahanan negara itu sendiri. Isu HAM terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis adalah salah satu peluang yang dipakai oleh aktor-aktor internasional dalam era globalisasi ini untuk memperkuat pengaruh mereka terhadap negara-negara di dunia.

5.1.1 Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Tekanan Masyarakat Internasional Terkait Legalisasi LGBT Khususnya Menyangkut Perkawinan Sejenis.

Indonesia mendapat tekanan dari masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM. Indonesia melakukan upaya untuk menghadapinya dengan melihat pada aspek pertahanan karena tindakan legalisasi perilaku LGBT terkait perkawinan sejenis tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Upaya yang dilakukan adalah penguatan warga negara sebagai komponen dalam sistem pertahanan negara melalui program bela negara. Upaya ini menjadi sangat penting untuk membentuk sikap mental warga negara yang meyakini sungguh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan

memiliki kemampuan untuk menangkal pandangan dan nilai-nilai serta ideologi negara lain yang bertentangan dengan Pancasila yang dalam hal ini termasuk legalisasi perkawinan sejenis.

5.1.2 Upaya Diplomasi Pertahanan Pemerintah Indonesia Melalui AICHR Untuk Menghadapi Masyarakat Internasional Yang Memberikan Tekanan Terkait Legalisasi LGBT Khususnya Menyangkut Perkawinan Sejenis

Indonesia dalam posisi sebagai negara anggota PBB sudah meratifikasi Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik. Kenyataan ini seharusnya sudah bisa menumbuhkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi pemajuan dan penegakan HAM wargan negaranya. Tetapi sebaliknya Indonesia justru mendapat tekanan dari masyarakat internasional untuk melegalkan perilaku LGBT terkait perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM. Hal ini tidak terlepas dari pemaknaan Indonesia terhadap ikatan perkawinan itu sendiri.

Indonesia berada dalam posisi menolak untuk memberikan legalitas terhadap perkawinan sejenis karena tidak sesuai dengan undang-undang serta norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri dapat dikatakan belum memiliki satu ketegasan sikap yang bisa dikomunikasikan dalam menghadapi masalah ini. Opini publik yang disampaikan tokoh politik dan tokoh agama di Indonesia masih diliputi pendapat pribadi. Sehingga cara yang dipilih Pemerintah Indonesia untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis adalah dengan melakukan diplomasi melalui AICHR.

Sebagai komisi HAM antar pemerintah di ASEAN, AICHR dianggap mampu untuk melakukan diplomasi yang terkait dengan penyelesaian isu-isu HAM di ASEAN termasuk didalamnya isu legalisasi LGBT. Diplomasi publik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia harus didukung dengan pelaksanaan diplomasi pertahanan. Hal ini penting untuk

melindungi Pancasila sebagai ideologi negara dan warga negara sebagai komponen pertahanan negara dari berbagai pandangan dan nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa sehingga berpotensi untuk berkembang menjadi ancaman nonmilitier.

Program Bela Negara dapat menjadi strategi untuk mendukung kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan. Penggunaan strategi ini tentunya membutuhkan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri RI sebagai unsur utama sekaligus sebagai komponen ofensif dan Kementerian Pertahanan RI sebagai unsur militer yang juga berperan sebagai komponen defensif. Keterlibatan kaum LGBT dalam program bela negara disertai dengan sikap dan jiwa bela negara menjadi bukti bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata negara dan tidak ada pembedaan yang berlaku khususnya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Dalam konteks menghadapi tekanan masyarakat internasional untuk melegalkan LGBT terkait perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM maka dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah Indonesia melalui upaya diplomasi pertahanan. Oleh karenanya diperlukan penelitian lanjutan mengenai peran diplomasi pertahanan Indonesia untuk menghadapi isu-isu yang terkait dengan HAM pada tataran global dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemajuan nilai-nilai Hak Asasi Manusia itu sendiri.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan saran praktis untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia. Pihak-pihak tersebut antara lain Kementerian Pertahanan RI , Kementerian Luar Negeri RI, serta perwakilan AICHR Indonesia harus terlebih dahulu memahami model

diplomasi pertahanan untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM serta memahami kepentingan nasional Indonesia agar memiliki kesamaan cara pandang dalam melaksanakannya.

Selain itu perwakilan Indonesia untuk AICHR juga bisa turut terlibat dalam program bela negara untuk kemudian dibina menjadi kader bela negara. Dengan demikian memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk menjadi bekal informasi dalam mengkomunikasikan program bela negara kepada masyarakat internasional melalui forum-forum AICHR yang membahas isu dan mekanisme HAM. Selain itu, perwakilan AICHR Indonesia juga bisa berperan untuk memberikan pemahaman terkait nilai-nilai HAM dalam bingkai pemajuan dan perlindungan bagi warga negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat ASEAN. Hal ini dimungkinkan karena program pembinaan bela negara dilakukan dalam berbagai lingkungan masyarakat yakni lingkungan pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja.